

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Yogyakarta, Februari 2015
Kepala



Tavip Agus Rayanto
NIP. 19641107 199103 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF



Visi jangka menengah BAPPEDA DIY yang tertuang dalam Rencana Strategis BAPPEDA DIY Tahun 2012-2017 adalah **"Terwujudnya Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Berkualitas"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas manajemen data.

Laporan Kinerja BAPPEDA DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian BAPPEDA DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra BAPPEDA DIY Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

A. Capaian Kinerja

Ringkasan prestasi kinerja BAPPEDA DIY yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-1 yaitu keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat terdiri dari 1 (satu) indikator yakni persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan tahun 2014 sebesar 16,90%. Hal ini menunjukkan bahwa target capaian kinerja sasaran telah tercapai karena telah melampaui target capaian yaitu sebesar 20,45%. Jika dibandingkan pada tahun 2013 dan tahun 2012, capaian indikator kinerja sasaran ke-1 semakin mengalami perbaikan, pada tahun 2013 masih ada deviasi capaian target sebesar 1,34%. Pada tahun 2014 kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan dapat diturunkan sebesar 3,55% dari target yang ditetapkan. Menurunnya kesenjangan pencapaian itu karena semakin banyaknya indikator

yang telah melebihi target ($\geq 100\%$) yakni sebesar 177 indikator dari total 213 indikator.

- b. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-2 yaitu integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat, terdiri dari 1 indikator yakni Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, dan Sarana Prasarana pada tahun 2014 adalah sebesar 16,90%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat kecenderungan yang positif dari semua bidang, hal ini ditunjukkan adanya *trend* penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 perhitungan secara komposit dari semua bidang sektoral menunjukkan bahwa masih ada deviasi sebesar 1,34 % dan pada tahun 2014 bisa ditunjukkan bahwa ada penurunan persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, dan Sarana Prasarana sebesar 3,55% dari target yang ditetapkan.
- c. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-3 yaitu konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD pada tahun 2014 telah melebihi target sebesar 0,10%. Target pada tahun 2014 sebesar 79% mampu direalisasikan sebesar 79,10 %. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,10% dibandingkan pencapaian di tahun 2013. Pada akhir RPJMD tahun 2017 diharapkan target 100 % dapat dicapai karena pada tahun 2014 ini telah disumbang pencapaian sebesar 79,10%. Ketercapaian sasaran tahunan menunjukkan tingkat pengendalian terhadap pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan.
- d. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-4 yaitu data yang aktual dan valid untuk mendukung proses perencanaan mempunyai satu indikator yaitu persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia, pada tahun 2014 meskipun kecil telah melebihi target sebesar 0,04 %. Target realisasi capaian kinerja sasaran tersebut yang ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 96% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 96,04%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan capaian sebesar 3,65 % dari tahun 2013 yang terealisasi sebesar 92,39%. Jika

dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2017 maka realisasi capaian indikator kinerja sasaran ini mencapai 96,04%.

- e. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-5 meningkatkan aksesibilitas terhadap data mempunyai satu indikator yaitu persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses. Capaian pada tahun 2014 melebihi target sebesar 6,38%. Target realisasi capaian kinerja sasaran ke-5 yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah sebesar 70% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 76,38%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka ada kenaikan capaian indikator kinerja sebesar 5,14%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2017 maka realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-5 sebesar 76,38%.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Data layanan data kepada masyarakat berupa Sistem Informasi Dataku, Website BAPPEDA DIY, Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah, Sistem Informasi Perencanaan, Sistem Informasi Monev, dan Sistem Informasi Penataan Ruang yang dilakukan mempermudah pengelolaan data baik yang bersifat tabular maupun spasial. Pengguna informasi dapat dengan mudah mengakses berbagai data maupun informasi perencanaan yang dimiliki BAPPEDA DIY.

B. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan BAPPEDA DIY di tahun 2014 sebesar Rp 22.830.292.152 atau mencapai 93,67% dari anggaran sebesar Rp 24.373.703.317. Kinerja ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2013 yang realisasinya sebesar 80,38%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Pegawai	3
1.4 Sarana dan Prasarana	6
1.5 Keuangan	10
1.6 Isu Strategis BAPPEDA	11
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.1.1 Visi dan Misi	12
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	13
2.1.3 Strategi	15
2.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Misi 1..	15
2.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Misi 2..	16
2.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Misi 3..	16
2.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)	16
2.2 Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Tahun 2014	17
2.3 Rencana Anggaran	17
2.3.1 Target Belanja BAPPEDA DIY	18
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2014	19
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21

3.2.1 Sasaran Keterpaduan Program/Kegiatan Pembangunan Meningkat	21
3.2.2 Sasaran Integrasi Program Pembangunan Sektoral Dan Kewilayahan Meningkatkan	24
3.2.3 Sasaran Konsistensi Antara Program Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Dengan Rencana Yang Telah Disusun Sebelumnya	27
3.2.4 Sasaran Strategis Data Perencanaan yang Aktual dan Valid	31
3.2.5 Sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Terhadap Data	35
3.3 Akuntabilitas Keuangan	37
3.4 Tindak Lanjut atas Evaluasi Laporan Kinerja 2013.....	38
BAB 4 PENUTUP	40
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu BAPPEDA DIY Tahun 2014	4
Tabel 1-2. Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA DIY Tahun 2014	6
Tabel 1-3. Anggaran belanja Langsung BAPPEDA DIY Tahun 2014.....	10
Tabel 2-1. Tujuan Yang Ditetapkan Untuk mencapai Misi	14
Tabel 2-2. Target Capaian Sasaran Kinerja BAPPEDA 2012-2017	15
Tabel 2-3. Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2014.....	17
Tabel 2-4. Target Belanja BAPPEDA DIY Tahun 2014.....	18
Tabel 2-5. Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Strategis BAPPEDA DIY	
Tahun 2014	18
Tabel 3-1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel 3-2. Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Tahun 2014	20
Tabel 3-3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1 Keterpaduan Program/Kegiatan pembangunan meningkat.....	22
Tabel 3-4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2 Integrasi Program Pembangunan Sektoral dan Wilayah Meningkat	24
Tabel 3-5. Capaian Indikator Program Bidang Sasaran Strategis Integrasi Program Pembangunan Sektoral dan Wilayah Meningkat.....	25
Tabel 3-6. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-3 Konsistensi antara Program Kegiatan yang Telah Dilaksanakan dengan Rencana yang Telah Disusun Sebelumnya.....	28
Tabel 3-7. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4 Data Perencanaan Yang Aktual dan Valid.....	32
Tabel 3-8. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Meningkatkan Aksesibilitas Terhadap Data	35
Tabel 3-9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014 ...	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Persentase Pegawai BAPPEDA DIY	5
Gambar 2.	Website Jogja Plan	7
Gambar 3.	Website Monev	8
Gambar 4.	Website Meta Data Spasial Daerah	8
Gambar 5.	Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang	9
Gambar 6.	Website Dataku.....	9
Gambar 7.	Persentase Anggaran BAPPEDA DIY Tahun 2014	10
Gambar 8.	Pembukaan Musrenbang DIY Tahun 2014	23
Gambar 9.	Forum SKPD.....	26
Gambar 10.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kegiatan sektoral.....	27
Gambar 11.	Rapat Koordinasi Pengendalian	31
Gambar 12.	Rakor SIPD 2014	34
Gambar 13.	Publikasi Data Melalui Web BAPPEDA.....	37

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi:

1. *Tugas dan Fungsi*
2. *Pegawai*
3. *Sarana dan Prasarana*
4. *Keuangan*
5. *Isu Strategis BAPPEDA*

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA DIY Tahun 2014 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BAPPEDA DIY.
2. Mendorong BAPPEDA DIY didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BAPPEDA DIY untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAPPEDA DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

BAPPEDA DIY merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
2. Bidang Pemerintahan, yang terdiri dari Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik dan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan;
3. Bidang Perekonomian, yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian dan Kelautan dan Sub Bidang Dunia Usaha;
4. Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat;
5. Bidang Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan Energi Sumberdaya Mineral dan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Pengendalian, yang terdiri dari Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Sub Bidang Kinerja Program;
7. Bidang Perencanaan dan Statistik, yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Statistik;
8. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah (UPTLTD); serta
9. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA DIY mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA DIY mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
6. Penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan akhir masa jabatan Kepala Daerah serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Pegawai

Sampai dengan Desember 2014, pegawai BAPPEDA DIY tercatat sebanyak 114 orang yang terdiri dari 21 orang pejabat struktural, 10 orang pejabat fungsional tertentu, dan 83 orang fungsional umum. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal diuraikan sebagai berikut:

a) Pejabat Fungsional Tertentu

Di samping pejabat struktural, berdasarkan analisis kebutuhan pejabat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun

2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada instansi BAPPEDA DIY dibutuhkan 2 orang fungsional peneliti, 25 orang pejabat fungsional perencana serta 1 orang arsiparis. Kondisi saat ini baru tersedia 9 orang pejabat fungsional perencana dan 1 pejabat fungsional peneliti sehingga masih kekurangan 16 pejabat fungsional perencana dan 1 orang pejabat fungsional peneliti serta 1 orang arsiparis. Formasi pejabat fungsional di BAPPEDA DIY dapat dilihat pada tabel 1-1 berikut :

Tabel 1-1. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu BAPPEDA DIY Tahun 2014

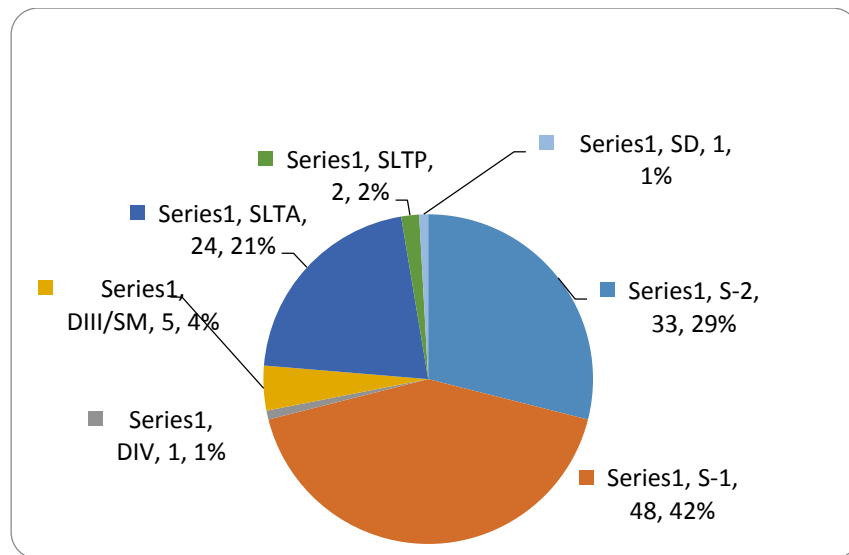
Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pejabat Fungsional Peneliti	0	1	1 orang
Pejabat Fungsional Perencana	6	3	9 orang
Pejabat Fungsional Arsiparis	0	0	0 orang

Sumber : BAPPEDA DIY, 2014

b) Pendidikan

Jumlah personil BAPPEDA DIY yang berpendidikan S1 berada pada posisi pertama sebanyak 48 orang. Di posisi kedua adalah pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 33 orang, dan di posisi ke tiga pegawai dengan pendidikan SLTA sebanyak 24 orang. Berada pada posisi ke empat adalah pegawai dengan pendidikan DIII atau sarjana muda sebanyak 5 orang, selanjutnya pegawai berpendidikan SLTP sebanyak 2 orang, pegawai berpendidikan D IV sebanyak 1 orang dan yang terakhir pegawai berpendidikan SD sebanyak 1 orang. Persentase dari masing-masing tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada gambar.1 di bawah ini:

Gambar 1. Persentase Pegawai BAPPEDA DIY



Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

c) Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Pekerjaan

Kebutuhan pegawai untuk jabatan struktural berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebanyak 23. Pada saat ini jumlah jabatan terisi sebanyak 22, dan 1 jabatan belum terisi yaitu di Sub Bagian Keuangan.

Untuk jabatan fungsional umum BAPPEDA berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2012, kebutuhan pegawai adalah sebanyak 111 orang. Pada saat ini jabatan fungsional umum terisi sebanyak 83 orang. Dengan demikian masih dibutuhkan personil sebanyak 28 orang untuk melengkapi formasi. Untuk mencukupi kebutuhan pegawai, tiap tahun BAPPEDA DIY mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap;

Untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan personil BAPPEDA DIY sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan ke 2 atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 68 Tahun 2008 seharusnya memiliki 28 personil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan rincian 2 personil untuk jabatan fungsional peneliti, 25 personil untuk jabatan fungsional perencanaan, dan 1 orang fungsional arsiparis. Saat ini

BAPPEDA DIY baru memiliki 1 orang yang menduduki jabatan fungsional peneliti, 9 orang pada jabatan fungsional perencana, dan belum memiliki pejabat fungsional arsiparis. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional perencana BAPPEDA DIY telah mengirimkan personil pada diklat yang dibutuhkan.

1.4 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA DIY sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di BAPPEDA DIY dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1-2. Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA DIY Tahun 2014

Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
Alat-alat besar	2 buah	Baik
Alat-alat angkutan (roda dua, roda empat)	30buah	Baik
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.336 buah	Baik
Alat Studio dan komunikasi	209 buah	Baik
Bangunan gedung	1 buah	Baik
Jaringan	2 buah	Baik
Buku Perpustakaan	3.085 buah	Baik
Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan	1 buah	Baik
Aset Renovasi	2 buah	Baik

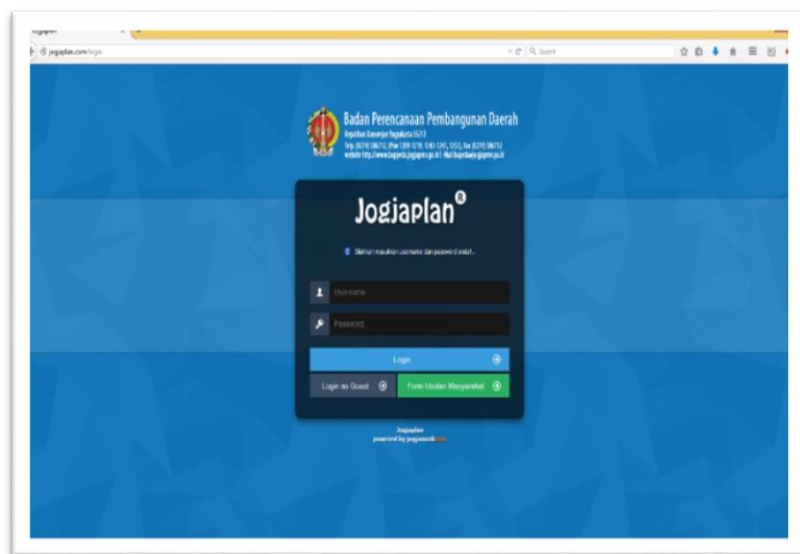
Sumber: BAPPEDA DIY,2014

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA sekaligus menunjang kinerja BAPPEDA DIY. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja BAPPEDA DIY secara optimal

Peralatan komputer sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA DIY sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (SKPD) BAPPEDA DIY membangun beberapa sistem informasi antara lain:

1. Sistem Informasi Perencanaan (<http://jogjaplan.com>) yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS;

Gambar 2. Website Jogja Plan

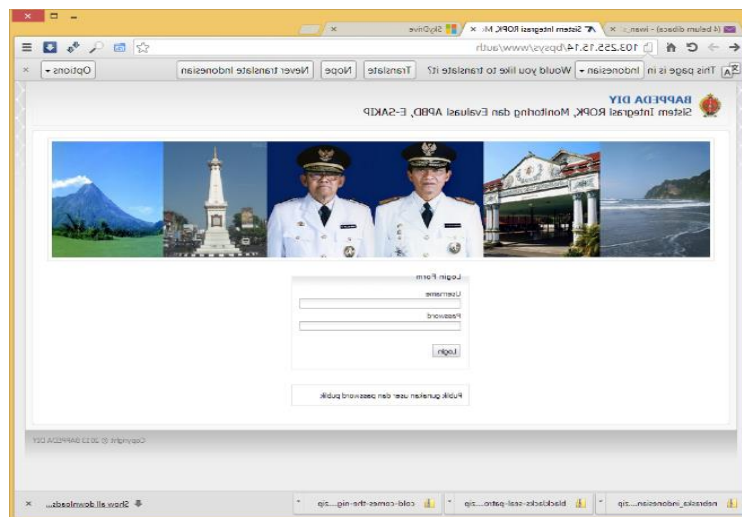


Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja). Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah SKPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap SKPD. Sedangkan bagi BAPPEDA DIY selaku fungsi pengendalian, sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan

pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;

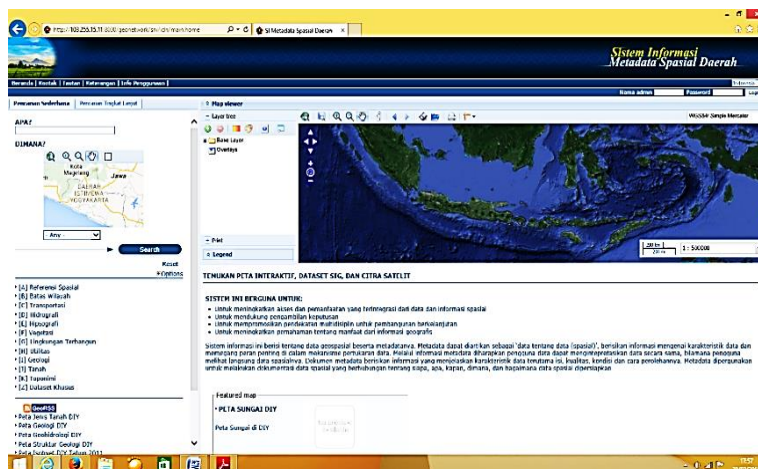
Gambar 3. Website Money



Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

3. Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD), Sistem Informasi MDSD berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemda DIY secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem;

Gambar 4. Website Meta Data Spasial Daerah



Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

4. Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR), SIPR berfungsi sebagai alat bantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam menjalankan tugasnya yaitu memaduserasikan (mengkoordinasikan) penataan ruang provinsi dengan kabupaten/kota;

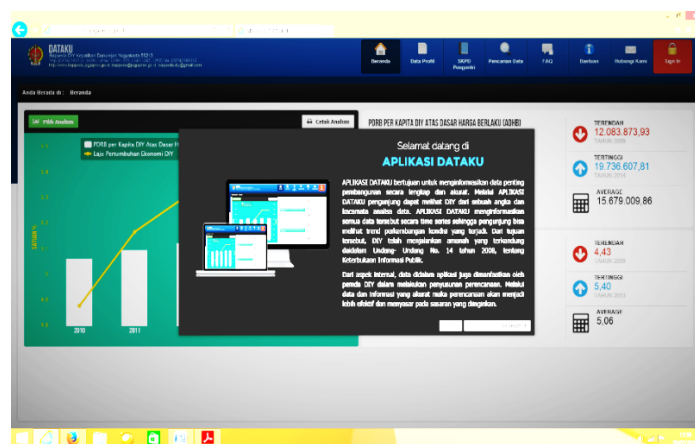
Gambar 5. Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang



Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

5. Sistem Aplikasi Dataku dikembangkan mulai tahun 2014 yang merupakan pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data perencanaan dengan tujuan untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan yang berasal dari semua stakeholder penyedia data baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sistem informasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan data perencanaan yang harus disediakan.

Gambar 6. Website Dataku



Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

BAPPEDA DIY selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas layanan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.

1.5 Keuangan

Dana atau anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas BAPPEDA DIY sebagian besar berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan didukung oleh anggaran dari dana Keistimewaan, serta APBN. Rincian anggaran yang dikelola oleh BAPPEDA DIY adalah sebagai berikut:

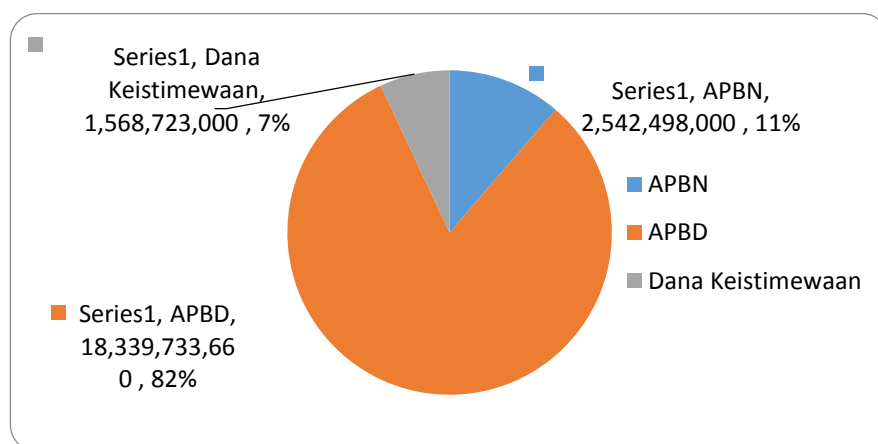
Tabel 1-3. Anggaran belanja Langsung BAPPEDA DIY Tahun 2014

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase
APBN	2.542.498.000	11.32%
APBD	18.339.733.660	81.69%
Dana Keistimewaan	1.568.723.000	6.99%
Total	22.450.954.660	100%

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

Anggaran terbesar yang dikelola oleh BAPPEDA DIY berasal dari APBD yaitu sebesar 81.69% sedangkan dana yang berasal dari APBN sebesar 11.32% dan dana keistimewaan sebesar 6.99%. Proporsi dari anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 7. Persentase Anggaran BAPPEDA DIY Tahun 2014



Sumber : BAPPEDA DIY, 2014

1.6 Isu Strategis BAPPEDA

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BAPPEDA DIY dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah sehingga menimbulkan kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan
3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang aktual, valid, dan mudah diakses sebagai bahan perencanaan pembangunan/perumusan kebijakan.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 Berisi:

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Tahun 2014*
3. *Perencanaan Anggaran*

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA DIY yaitu sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah yang sudah tertuang didalam RPJMD 2012 -2017.

Visi yang dituangkan dalam Renstra BAPPEDA 2012-2017 adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS"

Makna dari visi di atas adalah produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh BAPPEDA DIY harus dapat diandalkan sebagai alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah melalui upaya yang sinergis, terintegrasi, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral.

Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, BAPPEDA DIY harus menjalankan fungsi pengendalian yang kredibel agar perencanaan pembangunan yang sudah disusun dapat diwujudkan sesuai dengan target – target yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA DIY melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAPPEDA DIY secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi, dan integrasi perencanaan pembangunan

serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan visi BAPPEDA DIY 2012-2017 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Selanjutnya misi BAPPEDA DIY dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas manajemen data.

Misi 1, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas serta dapat diimplementasikan oleh SKPD teknis. Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas diperlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Misi 2, dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, selain koordinasi juga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat diketahui apakah proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan yang akan datang.

Misi 3, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan pengelolaan data yang baik dengan memastikan data tersebut valid/akurat, up to date, aktual, tersedia, dan mudah diakses. Oleh karenanya kualitas manajemen data sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan itu sendiri.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di

masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada Tabel 2-1. berikut :

Tabel 2-1. Tujuan Yang Ditetapkan Untuk mencapai Misi

NO	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah
2.	Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi
3.	Meningkatkan kualitas manajemen data	Menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan serta meningkatkan informasi yang dapat diakses masyarakat

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 2-2. berikut :

Tabel 2-2. Target Capaian Sasaran Kinerja BAPPEDA 2012-2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2012	Target Akhir 2017
1.	Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	28,19	11,15
2.	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana	%	30,86	11,15
3.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Target Sasaran RPJMD	%	0,00	100
4.	Data perencanaan yang aktual dan valid	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	%	92,00	100
5.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	%	50,00	100

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

2.1.3 Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.

2.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Misi 1

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi pertama strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui trilateral desk;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi jogjaplan.

B. Kebijakan

Kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi ini adalah dengan pengarusutamaan sistem informasi perencanaan terpadu.

2.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Misi 2

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi kedua strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan rekomendasi monitoring evaluasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan dengan legislatif ;
2. Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan.

B. Kebijakan

Kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran misi kedua adalah dengan meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu program kegiatan.

2.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Misi 3

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi ketiga strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan data dalam bentuk satu data pembangunan;
2. Memperkuat sistem informasi data terpadu.

B. Kebijakan

Kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran misi ketiga adalah : Membangun sistem satu data pembangunan.

2.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran BAPPEDA DIY menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2014 BAPPEDA DIY merencanakan target kinerja tahun 2014. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam RKT sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014.

2.2 Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja BAPPEDA tahun 2014:

Tabel 2-3. Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2014

No.	Sasaran	Indikator	Target %
1.	Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	20,45
2.	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana	20,45
3.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	79
4.	Data perencanaan yang aktual dan valid	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	96
5.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	70

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

2.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2014 BAPPEDA DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 23.904.871.616. Melalui mekanisme perubahan APBD 2014 menjadi Rp 24.373.703.317 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.033.969.657 dan Belanja Langsung Rp 18.339.733.660

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 22.830.292.152 (93,67%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 5.848.438.302 (25,62%) dan belanja langsung sebesar Rp 16.981.853.850,00 (74,38%).

2.3.1 Target Belanja BAPPEDA DIY

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA DIY menetapkan target belanja sebesar Rp 24.373.703.317,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar RP 6.033.969.657,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 18.339.733.660,- .

Tabel 2-4. Target Belanja BAPPEDA DIY Tahun 2014

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp 6.033.969.657	24,76%
Belanja Langsung	Rp 18.339.733.660	75,24%
Jumlah	Rp 24.373.703.317	100%

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2014 BAPPEDA DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2-5. Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Strategis BAPPEDA DIY Tahun 2014

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	1.702.443.200	13,00%	
2	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat	5.646.311.150	43,12%	
3	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	3.244.822.900	24,78%	
4	Data perencanaan yang aktual dan valid	2.179.133.400	16,64%	
5	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	321.944.110	2,46%	

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi:

1. *Capaian Kinerja Tahun 2014*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
3. *Akuntabilitas Keuangan*
4. *Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja 2013*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2014

BAPPEDA DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja BAPPEDA DIY tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel 3-1. berikut:

Tabel 3-1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3-2. Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Tahun 2014

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
1.	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	20,45	16,90	117,36	Hijau Tua
2.	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan sarana prasarana	%	20,45	16,90	117,36	Hijau Tua
3.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	%	79	79,10	100,13	Hijau Tua
4.	Data perencanaan yang aktual dan valid	Persentase Kelengkapan data perencanaan yang tersedia	%	96	96,04	100,04	Hijau Tua
5.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	%	70	76,38	109,11	Hijau Tua

Sumber : BAPPEDA DIY, 2014

Dari tabel 3-2. di atas terdapat lima sasaran strategis yang terbagi ke dalam lima indikator sasaran strategis. Pada Tahun 2014, kelima indikator tersebut tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan atau telah mencapai sekurangnya 100% untuk masing-masing indikator sebesar 100 % dari total indikator. Capaian tertinggi adalah indikator kinerja ke-1 dan ke-2 dengan persentase capaian masing-masing sebesar 117,36%, disusul dengan indikator kinerja ke-5 dengan persentase capaian sebesar 109,11 %, berikutnya indikator kinerja ke-3 dengan persentase capaian sebesar 100,13% dan di urutan terakhir adalah indikator kinerja ke-4 dengan persentase capaian sebesar 100,04%. Hal

ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2014, 5 (lima) sasaran strategis BAPPEDA DIY, yang dicerminkan dalam capaian 5 (lima) Indikator Kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Bahkan beberapa indikator kinerja mengalami peningkatan dibanding capaian indikator pada tahun 2013. Secara rinci capaian indikator kinerja Bappeda menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Keterpaduan Program/Kegiatan Pembangunan Meningkatkan

Sasaran strategis keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat, yang merupakan sasaran strategis pertama dari lima sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh BAPPEDA DIY. Tolok ukur capaian sasaran keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan.

Berdasarkan rumusan indikator di atas, target yang ditetapkan merupakan persentase selisih (gap) antara target indikator yang tidak tercapai pada tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah indikator pada kurun waktu pembangunan yang telah ditetapkan. Semakin kecil angka persentase selisih capaian sasaran, maka akan semakin baik kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target indikator kinerja RPJMD tahun (N) yang tidak tercapai}}{\text{Total jumlah indikator RPJMD tahun 2012 – 2017}} \times 100\%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1 Keterpaduan Program/Kegiatan Pembangunan Meningkatkan

No.	Indikator	Capaian 2013 %	2014			Target Akhir Renstra (2017) %	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target %	Realisasi %	% Realisasi		
1.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	26,82	20,45	16,90	117,36	11,15	48,42

Sumber : BAPPEDA DIY, 2014

Dari tabel 3-3. diatas, terlihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja untuk sasaran ke-1 ini, pada tahun 2014, adalah sebesar 16,90%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah terpenuhi dan dapat melampaui target yang ditentukan yakni sebesar 20,45%.

Deviasi (selisih) antara target dan realisasi pada tahun ke-2 RPJMD DIY ini (tahun 2014) meningkat menjadi 3,55%. Angka *deviasi* ini lebih baik jika dibandingkan dengan *deviasi* pada tahun pertama RPJMD (tahun 2013) yakni sebesar 1,34%, dari target sebesar 24,16% dapat tercapai sebesar 26,82%.

Peningkatan angka deviasi menunjukkan bahwa jumlah indikator yang dapat memenuhi target bahkan melampaui target telah mengalami peningkatan. Sebagai gambaran, pada tahun 2014, dari total 213 indikator yang ada, sebanyak 177 indikator telah tercapai, dan hanya 36 indikator yang tidak tercapai.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan yang cukup pesat terhadap persentase kesenjangan pencapaian indikator. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk tercapainya angka target pada akhir tahun RPJMD DIY 2012-2017 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RENSTRA BAPPEDA DIY 2012-2017 yaitu sebesar 11,15%.

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-1 ini, diampu oleh 1 (satu) program, yakni Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan, dengan

total alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.702.443.200,00. Besaran serapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini, atau pencapaian sasaran strategis ke-1, rata-rata adalah sebesar 97,24%. Hal ini menunjukkan bahwa telah dihasilkan suatu efisiensi anggaran sebesar 2,76% untuk mencapai sasaran strategis ke-1.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-1 ini tidak terlepas dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang dilakukan melalui:

1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah DIY;
2. Kesepakatan bersama antara masing-masing pihak, terutama antara pihak eksekutif dengan legislatif, untuk menjaga kesesuaian dokumen perencanaan daerah, mulai dari dokumen RKPD menjadi dokumen DPA;
3. Pemanfaatan aplikasi perencanaan, dalam hal ini Jogja Plan yang optimal;
4. Sinergi antara aplikasi perencanaan (Jogja Plan) dengan aplikasi anggaran (SIPKD).

Gambar 8. Pembukaan Musrenbang DIY Tahun 2014



Sumber: BAPPEDA DIY 2014

Untuk meningkat akselerasi, agar target capaian indikator dapat terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam dokumen RPJMD DIY, dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memanfaatkan keberadaan dan meningkatkan fungsi tenaga fungsional perencanaan sehingga proses perencanaan dapat berjalan optimal;
2. Penyempurnaan aplikasi perencanaan, sehingga dapat mengurangi penyimpangan dalam proses perencanaan pembangunan.

3.2.2 Sasaran Integrasi Program Pembangunan Sektor dan Wilayah Meningkatkan

Tolok ukur capaian sasaran integrasi program pembangunan sektoral dan wilayah meningkat, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, dan Sarana Prasarana.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target indikator kinerja RPJMD bidang tahun (N) yang tidak tercapai}}{\text{Total jumlah indikator RPJMD tahun 2012 – 2017}} \times 100\%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran ke-2 integrasi program pembangunan sektoral dan wilayah meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2 Integrasi Program Pembangunan Sektor dan Wilayah Meningkatkan

No	Indikator	Capaian 2013 %	2014			Target Akhir Renstra (2017) %	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana	26,82	20,45	16,90	117,36	11,15	48,42

Sumber : BAPPEDA DIY, 2014

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-2 tahun 2014 sebesar 16,90% didukung oleh kinerja Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, dan Bidang Sarana Prasarana.

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-2 pada tahun 2014 telah melebihi target sebesar 3,55%. Dari target yang ditetapkan sebesar 20,45%, mampu direalisasikan sebesar 16,90%. Dibandingkan dengan Tahun 2013 telah terjadi kenaikan yang signifikan. Pada tahun tersebut, target sebesar 24,16% baru dapat tercapai sebesar 26,82%. Pada akhir RPJMD tahun 2017 diharapkan target 100% dapat dicapai karena pada tahun 2014 ini telah disumbang pencapaian sebesar 48,42%. Ketercapaian sasaran tahunan menunjukkan tingkat pengendalian terhadap pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan.

Detail sumbangan persentase kesenjangan dari bidang-bidang dapat dilihat pada tabel 3-5. berikut:

Tabel 3-5. Capaian Indikator Program Bidang Sasaran Strategis Integrasi Program Pembangunan Sektor dan Wilayah Meningkatkan

Bidang	Jumlah Indikator	Indikator Belum Tercapai 2014	Target 2014	Realisasi %	Persentase Capaian %
Pemerintahan	41	12	0,97	5,63	20,82
Perekonomian	40	5	4,87	2,35	151,80
Kesejahteraan Rakyat	76	14	12,66	6,57	148,08
Sarana Prasarana	56	5	1,95	2,35	79,62

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

Kontribusi bidang yang menyumbang persentase kesenjangan paling kecil hingga yang terbesar adalah : Bidang Sarana Prasarana sebesar 2,35%, Bidang Perekonomian sebesar 2,35%, Bidang Pemerintahan sebesar 5,63% dan Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 6,57%.

Realisasi fisik kegiatan APBD 2014 untuk Sasaran ke-2 Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan mencapai 100% dengan realisasi keuangan secara kumulatif mencapai 94,12% artinya telah terjadi efisiensi sebesar 5,88% di dalam pelaksanaan anggaran.

Realisasi keuangan dari masing-masing bidang adalah: Bidang Pemerintahan sebesar 94,52% atau terjadi efisiensi sebesar 5,48%, Bidang Perekonomian sebesar 93,18% atau terjadi efisiensi sebesar 6,82%, Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 94,20% atau terjadi efisiensi sebesar 5,80%, dan Bidang Sarana Prasarana sebesar 94,59% atau terjadi efisiensi sebesar 5,41%.

Kondisi ini mampu mendukung pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dari sasaran ke-2 tersebut, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien untuk mencapai dampak dari perencanaan program kegiatan yang diharapkan. Secara umum faktor-faktor yang mendukung terjadinya efisiensi adalah adanya kebijakan *at-cost* pada perjalanan dinas luar daerah, dan penghematan biaya rapat karena adanya surat edaran Menpan terkait pembatasan pelaksanaan rapat-rapat di hotel.

Program perencanaan pembangunan tidak mempunyai nilai standar. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan beberapa target nasional dijalankan oleh SKPD Teknis pada Pemda DIY.

Gambar 9. Forum SKPD



Sumber: BAPPEDA DIY 2014

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian dari sasaran ke-2 ini adalah adanya koordinasi lintas sektor dan kewilayahan yang sudah berjalan cukup efektif. Faktor selanjutnya adalah keselarasan dan

kesesuaian tujuan dan sasaran SKPD dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD maupun RKPD. Faktor lain yang memberikan dukungan terhadap keberhasilan pencapaian dari sasaran ke-2 yaitu ketepatan penentuan target SKPD disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia maupun anggaran di SKPD.

Gambar 10. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Sektoral



Sumber : Bappeda DIY 2014

3.2.3 Sasaran Konsistensi Antara Program Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Dengan Rencana Yang Telah Disusun Sebelumnya

Tolok ukur capaian sasaran konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD.

Formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Indikator Sasaran tahun 'N' terhadap capaian akhir RPJMD}}{\text{Jumlah indikator sasaran}} \times 100 \%$$

Target dan realisasi kinerja sasaran ke-3 dapat dilihat pada tabel 3-6. berikut:

Tabel 3-6. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-3 Konsistensi antara Program Kegiatan yang Telah Dilaksanakan dengan Rencana yang Telah Disusun Sebelumnya

No	Indikator	Capaian 2013 %	2014			Target Akhir Renstra (2017) %	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target %	Realisasi %	% Realisasi		
1.	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	77	79	79,10	100,13	100	79,10

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-3 pada tahun 2014 telah melebihi target sebesar 0,10%, dari target sebesar 79% mampu direalisasikan sebesar 79,10%. Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2013 pencapaian di tahun 2014 terus mengalami kenaikan, yaitu dari 77% menjadi 79,10%, atau mengalami kenaikan sebesar 2,10%.

Pada akhir RPJMD tahun 2017 diharapkan target 100% dapat dicapai karena pada tahun 2014 ini telah disumbang pencapaian sebesar 79,10%. Pencapaian tersebut tidak dapat dipisahkan oleh capaian 17 Indikator Kinerja Utama Gubernur, yang mana sebanyak 10 indikator memenuhi/melebihi target dan 7 indikator tidak memenuhi target.

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-3 ini, diampu oleh 1 (satu) program, yakni Program Pengendalian Pembangunan Daerah, yang terbagi dalam 12 kegiatan, dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.244.822.900. Besaran serapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini, atau pencapaian sasaran strategis ke-4, rata-rata sebesar 93,44%. Hal ini menunjukkan bahwa telah dihasilkan suatu efisiensi anggaran sebesar 6,56%.

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya efisiensi adalah adanya kebijakan *at-cost* pada perjalanan dinas luar daerah dan penghematan

biaya rapat karena adanya surat edaran Menpan terkait pembatasan pelaksanaan rapat-rapat di hotel.

Pencapaian indikator sasaran ke-3 didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian 10 Indikator Kinerja Utama Gubernur (IKU) dapat melebihi target. Hal ini menunjukkan dari sisi perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan pengendalian sudah dapat berjalan dengan baik. Dari sisi perencanaan ada kontribusi nyata antara program/kegiatan yang didesain terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama. Selain ketepatan dari sisi perencanaan pencapaian tersebut tidak terlepas dari sisi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan.
2. Capaian Indikator yang dapat melebihi target misalnya pada Indikator Angka Melek Huruf, Indeks Ketimpangan Antar Wilayah, Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, Nilai Akuntabilitas, Load Factor, dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang memberi kontribusi besar terhadap capaian kinerja Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD sebesar 79,10%.
3. Pengendalian yang sudah dilakukan terhadap pelaksanaan capaian sasaran tahunan sudah dilakukan dengan baik sehingga capaian sasaran melebihi target yang sudah ditentukan. Capaian indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemda DIY dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan (indikator kinerja utama Pemda DIY) sebagaimana arah RPJMD DIY 2012-2017.

Meskipun sasaran indikator ke-3 telah melebihi target, tetapi dalam proses pencapaiannya mengalami beberapa hambatan antara lain:

1. Tingkat capaian sebesar 79,10% akan terlampaui apabila 17 Indikator dapat mencapai/melebihi target. Pencapaian 7 Indikator yang belum memenuhi target menjadi nilai pengurang capaian kinerja Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. Ketidaktercapaian 7 indikator dapat disebabkan

karena program/kegiatan yang sudah didesain tidak mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pencapaian Indikator atau karena pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/.kegiatan yang sudah disiapkan,

2. Capaian 7 Indikator yang belum memenuhi target berpengaruh terhadap capaian kinerja Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. Hambatan pencapaian target secara ringkas diinformasikan sebagai berikut :
 - a. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya belum mencapai target karena pembinaan desa budaya dan organisasi budaya belum optimal.
 - b. Rerata lama sekolah pada tahun 2014 sebenarnya sudah cukup tinggi dengan tingkat capaian yang lebih baik dari pada tahun 2013. Ketidakcapaian indikator ini dengan target, disebabkan adanya persentase struktur penduduk usia tua dalam kategori tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD sebesar 16,29% dari penduduk usia 15 tahun ke atas.
 - c. Capaian angka harapan hidup pada tahun 2014 masih belum memenuhi target karena adanya kasus kematian bayi yang spesifik, terutama disebabkan adanya kondisi berat bayi lahir rendah (BBLR) balita yang mempengaruhi tekanan terhadap peningkatan angka harapan hidup.
 - d. Pendapatan perkapita tahun 2014 tercapai sebesar Rp. 7.100.000,- dengan tingkat sebesar 95,95% dari target. Ketidaktercapaian indikator ini disebabkan adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2014.
 - e. Indeks ketimpangan pendapatan menunjukan capaian yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat, terutama pada masyarakat berpendapatan rendah.
 - f. Capaian lama tinggal wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara tahun 2014 belum dapat memenuhi target. Hal ini disebabkan karena dukungan infrastruktur belum memadai seperti kapasitas Bandara Udara

Adisutjipto belum memungkinkan pendaratan jenis pesawat berbadan lebar. Penyebab lain rendahnya lama tinggal wisatawan adalah DIY belum menjadi tujuan destinasi utama bagi wisatawan mancanegara.

3. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya

Guna meminimalisir hambatan-hambatan dalam pencapaian sasaran ke-3 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kebijakan *affirmative* terhadap capaian indikator yang belum memenuhi target melalui penguatan program/kegiatan pendukung.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Gambar 11. Rapat Koordinasi Pengendalian



Sumber: BAPPEDA DIY 2014

3.2.4 Sasaran Strategis Data Perencanaan yang Aktual dan Valid

Sasaran strategis ke-4 yang harus dicapai oleh BAPPEDA DIY adalah penyediaan data yang aktual dan valid untuk mendukung proses perencanaan. Indikator capaian yang digunakan dalam sasaran strategis ke-4 ini adalah persentase kelengkapan data perencanaan

yang tersedia. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Data yang terisi}}{\text{Jumlah data yang tersedia}} \times 100\%$$

Tabel 3-7. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4 Data Perencanaan Yang Aktual dan Valid

No.	Indikator	Capaian 2013 %	2014			Target Akhir Renstra (2017) %	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target %	Realisasi %	% Realisasi		
1.	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	92,39	96	96,04	100,04	100	96,04

Sumber : BAPPEDA DIY, 2014

Ketersediaan data yang aktual dan valid, sangat erat kaitannya dengan keberadaan dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) selaku lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan kegiatan penyediaan data statistik, sesuai Peraturan Presiden no. 86 tahun 2007. Dengan adanya kewenangan dan tugas fungsi BPS tersebut, maka BAPPEDA DIY menjalin kerjasama dengan pihak BPS DIY dalam penyediaan data pembangunan yang tertuang dalam naskah kerjasama nomor : $\frac{027/01238}{34500.083.1}$ pada tanggal 7 Februari 2014 guna penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian target sasaran strategis penyediaan data yang aktual dan valid di tahun 2014 telah terpenuhi, yakni sebesar 96,04% dari target 96,00%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir masa RPJMD 2012-2017 (tahun 2017), maka realisasi capaian indikator kinerja sasaran ini mencapai 96,04% atau kurang 3,96% dari target yang diamanahkan pada akhir tahun RPMD 2012-2017;

Capaian pada tahun 2014 ini juga menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat pesat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun

2013. Pada tahun 2013, dari target yang diamanatkan sebesar 94%, hanya dapat direalisasikan sebesar 92,34%.

Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-4 ini, diampu oleh 1 (satu) program, yakni Program Pengembangan Statistik Daerah, yang terbagi dalam 2 kegiatan, dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.179.133.400,00. Besaran serapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini rata-rata sebesar 99,03%. Hal ini menunjukkan bahwa telah dihasilkan efisiensi anggaran sebesar 0,97%.

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya efisiensi adalah adanya kebijakan *at-cost* pada perjalanan dinas luar daerah dan penghematan biaya rapat karena adanya surat edaran Menpan terkait pembatasan pelaksanaan rapat-rapat di hotel.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Sinergi dan kerjasama yang baik dengan lembaga negara yang berwenang dalam penyediaan data, dalam hal ini Badan Pusat Statistik,
2. Mengoptimalkan proses integrasi data antara kabupaten/kota dengan instansi SKPD di Pemerintah Daerah DIY dalam satu kesatuan sistem, baik melalui Sistem Informasi DATAKU yang disediakan melalui website BAPPEDA DIY maupun melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Gambar 12. Rakor SIPD 2014



Sumber: BAPPEDA DIY 2014

Permasalahan dalam pencapaian sasaran ke-4 yang selama ini masih dirasakan adalah:

1. Ketersediaan data perencanaan pembangunan dari BPS waktunya kurang bertepatan dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Integrasi data kabupaten/kota dalam satu sistem masih belum dapat dilakukan secara optimal, hal ini dikarenakan belum tersedianya metadata di kabupaten/kota.

Ketersediaan data yang akurat dan valid merupakan kebutuhan mutlak dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, semakin cepat ketercapaian target pada akhir RPJMD 2012-2017, akan semakin baik. Untuk mendukung akselerasi guna pencapaian target ketersediaan data yang akurat dan valid sebesar 100%, telah dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Mengintensifkan kerjasama dengan BPS DIY selaku lembaga negara yang berwenang dalam penyediaan data dasar.
2. Meningkatkan peran kabupaten/kota dan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam melakukan pembaharuan maupun verifikasi data;

3. Meningkatkan kualitas ketersediaan jaringan teknologi informasi sebagai dukungan dalam proses penyediaan data lintas daerah maupun instansi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2.5 Sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Terhadap Data

Tolok ukur capaian sasaran ke-5 yaitu meningkatkan aksesibilitas terhadap data mempunyai satu indikator yakni persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran persentase data perencanaan yang dapat diakses adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Data / Informasi yang dapat diakses melalui web}}{\text{Jumlah data/informasi yang tersedia di BAPPEDA}} \times 100\%$$

Capaian indikator sasaran ke-5 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3-8. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Meningkatkan Aksesibilitas Terhadap Data

No	Indikator	Capaian 2013 %	2014			Target Akhir Renstra (2017) %	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target %	Realisasi %	% Realisasi		
1.	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	71,24	70	76,38	109,11	100	76,38

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-5 pada tahun 2014 telah melebihi target sebesar 6,38%. Target realisasi capaian kinerja sasaran ke-5 yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah sebesar 70% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 76,38%.

Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2013 pencapaian di tahun 2014 mengalami kenaikan, yaitu dari 71,24% menjadi 76,38, atau sebesar 5,14%.

Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2017 maka realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-5 telah mencapai sebesar 76,38%.

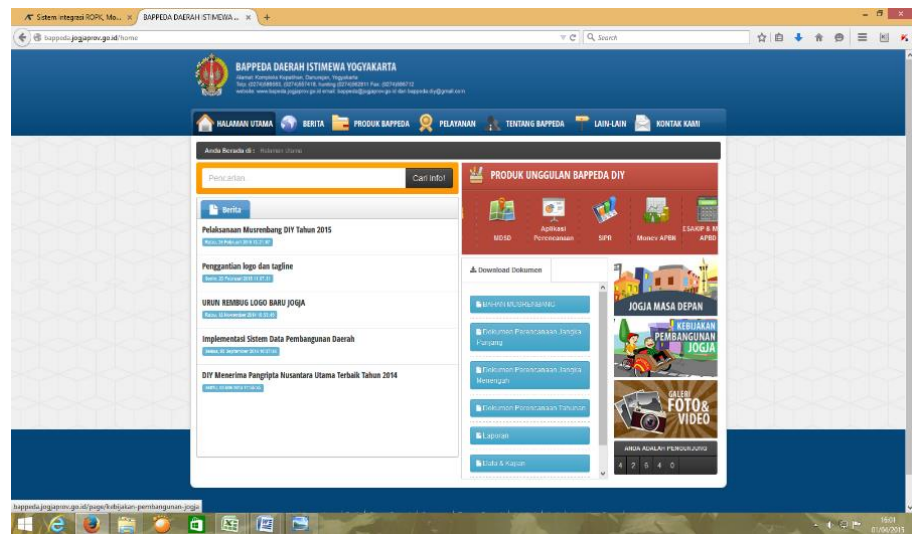
Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-5 ini, diampu oleh 1 (satu) program, yakni Program Pengembangan Data/Informasi, yang terbagi dalam 4 kegiatan, dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 321.944.110. Besaran serapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini, atau pencapaian sasaran strategis ke-5, rata-rata sebesar 99,16%. Hal ini menunjukkan bahwa telah dihasilkan suatu efisiensi anggaran sebesar 0,84%. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya efisiensi adalah adanya kebijakan at-cost pada perjalanan dinas luar daerah.

Pencapaian sasaran ke-5 didukung oleh Pengembangan Sistem Pengelolaan Data layanan data kepada masyarakat berupa Sistem Informasi Dataku, Website BAPPEDA DIY, Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah, Sistem Informasi Perencanaan, Sistem Informasi Monev, dan Sistem Informasi Penataan Ruang yang dilakukan mempermudah pengelolaan data baik yang bersifat tabular maupun spasial. Pengguna informasi dapat dengan mudah mengakses berbagai data maupun informasi perencanaan yang dimiliki BAPPEDA DIY.

Di samping faktor pendukung terdapat pula faktor yang menghambat dalam proses pencapaian sasaran ke-5 ini yaitu Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan secara tepat dan efektif sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan.

Sebagai upaya meminimalisir faktor penghambat, telah dilakukan peningkatan koordinasi dan manajemen data untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (*up to date*) sebagai bahan perencanaan yang efektif.

Gambar 13. Publikasi Data Melalui Web BAPPEDA



Sumber: BAPPEDA DIY 2014

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 adalah sebesar 92,60% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama adalah sebesar 94,39%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung adalah sebesar 88,12%. Jika dilihat dari realisasi anggaran setiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-4 data perencanaan yang aktual dan valid dan sasaran ke-5 meningkatkan aksesibilitas terhadap data yaitu sebesar 99,39%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ke-3 konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya yaitu sebesar 88,56%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2014 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3-9. berikut:

Tabel 3-9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	20,45	16,90	117,36	1.702.443.200	1.661.278.399	97,58
2.	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat	20,45	16,90	117,36	5.646.311.650	5.339.189.380	94,56
3.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	79	79,10	100,13	3.244.822.900	2.873.522.585	88,56
4.	Data perencanaan yang aktual dan valid	96	96,04	100,04	2.179.133.400	2.165.743.400	99,39
5.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	70	76,38	109,11	321.944.110	319.976.810	99,39
Jumlah					13.094.655.260	12.359.710.574	94,39
Belanja Langsung Pendukung					5.245.078.400	4.622.143.276	88,12
Total Belanja Langsung					18.339.733.660	16.981.853.850	92,60

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

3.4 Tindak Lanjut atas Evaluasi Laporan Kinerja 2013

Hasil evaluasi dari Inspektorat, Laporan Kinerja BAPPEDA DIY Tahun 2013 memperoleh nilai sebesar 74,79 dengan interpretasi predikat B (Baik), perlu sedikit perbaikan.

1. Rekomendasi Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Bappeda 2013:
 - a. Perencanaan Kinerja, yaitu agar lebih baik dalam mengimplementasikan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.
 - b. Pengukuran Kinerja, yaitu agar lebih baik dalam mengimplementasikan Pengukuran Kinerja.
 - c. Pelaporan Kinerja, yaitu agar lebih meningkatkan kualitas penyajian informasi kinerja dan lebih mengoptimalkan pemanfaatan informasi kinerja.

- d. Evaluasi Internal, yaitu agar lebih optimal dalam memanfaatkan evaluasi internal.

2. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, BAPPEDA DIY telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahunan lebih baik melalui proses yang melibatkan seluruh komponen BAPPEDA DIY.
- b. Pengukuran kinerja sasaran BAPPEDA DIY dijabarkan dalam target dan capaian per triwulan.
- c. Pelaporan kinerja menyajikan informasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja, dan sebagai upaya untuk tindak lanjut.
- d. Telah dilaksanakan evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Kepala BAPPEDA DIY secara rutin.

BAB 4

PENUTUP

Bab 4 Berisi:

1. Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014, serta Penetapan Kinerja Tahun

2014 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 5 (lima) indikator

Penyelenggaraan kegiatan di BAPPEDA DIY pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun ke-3 dari Rencana Strategis BAPPEDA DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja BAPPEDA DIY tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

2. Hasil analisis 5 (lima) indikator sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA DIY yaitu Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan dan Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD, pada tahun 2014 telah melampaui target yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja BAPPEDA DIY adalah sebagai berikut:

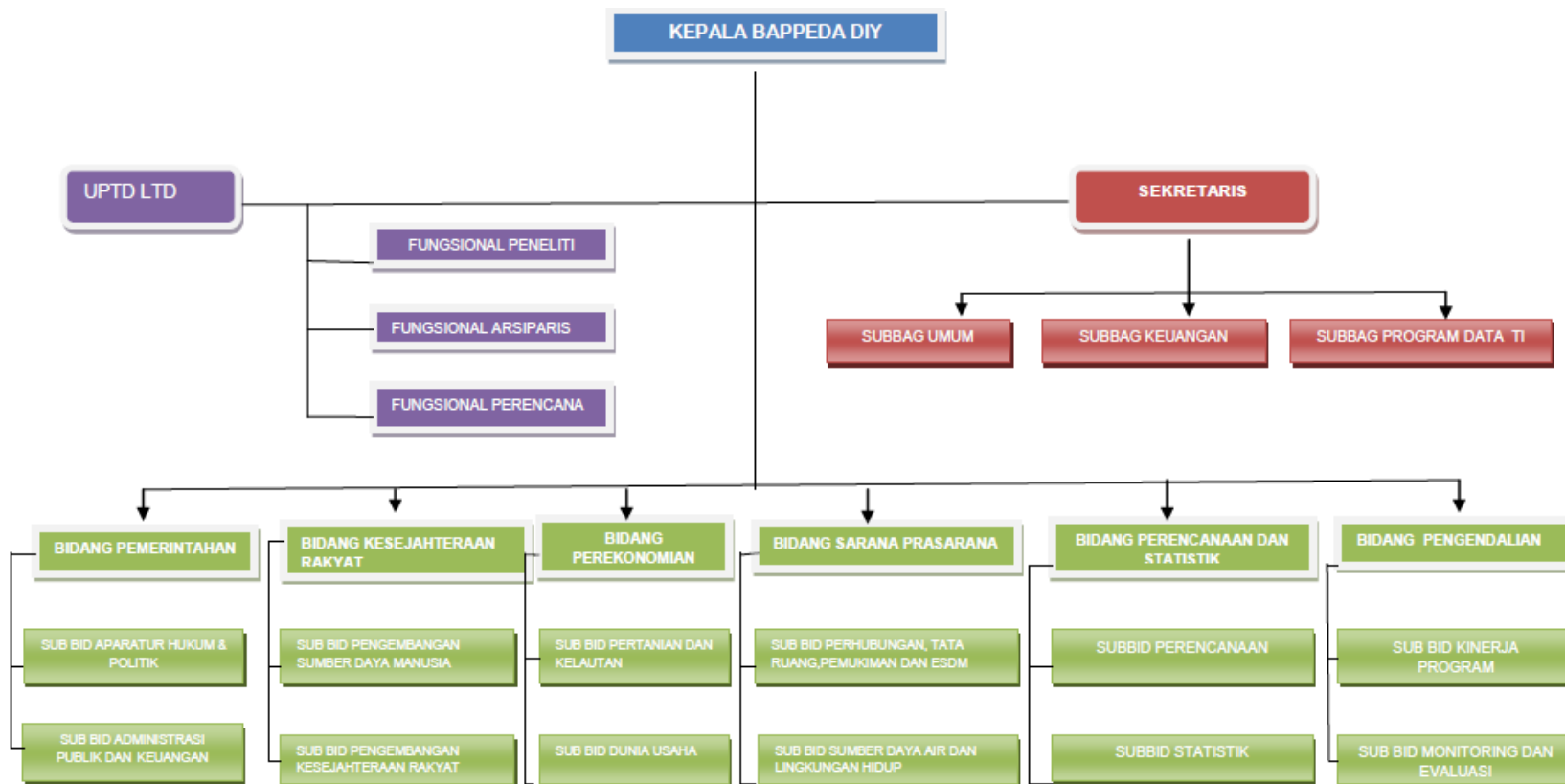
1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional peneliti dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di BAPPEDA DIY, terkait dengan penyusunan dokumen kinerja.

Laporan Kinerja BAPPEDA DIY tahun 2014 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN:

1. Struktur Organisasi BAPPEDA DIY;
2. Perencanaan Strategis BAPPEDA 2012-2017;
3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2014 (IKU Gubernur);
4. Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Utama Tahun 2014 Tingkat Provinsi Kategori A;
5. Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, Predikat “A” (Sangat Baik);
6. Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja.

Lampiran 1: Struktur Organisasi BAPPEDA DIY



Lampiran 2: Perencanaan Strategis BAPPEDA 2012-2017

Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017

No.	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
				Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	1.707.608	100%	1.707.608	100%	1.878.300	100%	1.795.000	100%	1.974.500
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	3.120.400	100%	3.120.400	100%	2.682.440	100%	2.950.684	100%	3.245.752
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung	100%	100%	93.115	100%	150.000	100%	165.000	100%	181.500	100%	199.650

		kelancaran tugas dan fungsi SKPD											
4.	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	161.325	100%	161.325	100%	177.458	100%	195.204	100%	214.724
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan	28,19%	24,16%	1.193,915	20,45%	2.190.000	17,04%	2.265.000	13,94%	2.440.000	11,15%	2.690.000
6.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Pemerintahan	1,34%	1,15%	1.206,240	0,97%	1.010.000	0,81%	1.135.000	0,66%	1.260.000	0,53%	1.385.000
7.	Program Perencanaan	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran	6,71%	5,75%	848.749	4,87%	935.000	4,06%	985.000	3,32%	1.045.000	2,65%	1.175.000

	Pembangunan Perekonomian	Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Perekonomian											
8.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sosial Budaya	17,45%	14,96%	1.181.841	12,66%	1.365.000	10,55%	1.515.000	8,63%	1.665.000	6,90%	1.815.000
9.	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	Presentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana	2,68%	2,30%	1.389.811	1,95%	1.385.000	1,62%	1.535.000	1,33%	1.685.000	1,06%	3.635.000
10.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	0%	74%	1.439.699	79%	1.655.000	84%	1.875.000	91%	2.090.000	100%	2.300.000

11.	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang dapat Diakses	50%	60%	905.080	70%	570.000	80%	670.000	90%	770.000	100%	870.000
12.	Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase Kelengkapan Data Perencanaan Yang Tersedia	92%	94%	1.425.000	96%	1.475.000	97%	1.525.000	98%	1.575.000	100%	1.625.000

Sumber : RPJMD DIY, Tahun 2012-2017

Lampiran 3: Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2014 (IKU Gubernur)

No	Indikator	Capaian 2013	2014			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s/d 2014 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	63,46%	74,57%	65,73	88,15	70%	93,90
2.	Angka Melek huruf.	92,02	92,60	93,68	101,17	95	98,61
3.	Rata-rata lama sekolah.	9,21	10	9,46	94,60	12	78,83
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	0%	5	5	100	40%	12,50
5.	Angka Harapan Hidup.	74	74,41	73,74	99,10	74,55	100,26
6.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta).	6,94	7,40	7,10	95,95	8,5	83,53
7.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	0,4547	0,4515	0,4479	100,80	0,4481	100,04
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	0,3187	0,295	0,435	52,54	0,2878	48,85
9.	Jumlah wisatawan nusantara.	2.602.074	2.754.981	3.091.967	112,23	3.001.377	103,01
10.	Jumlah wisatawan mancanegara.	235.888	249.854	254.213	101,74	272.162	91,80
11.	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,59	2,15	1,58	73,49	2,6	60,77
12.	Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	1,90	2,25	1,95	86,67	2,69	72,49
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	B	B+	A	133,33	A	100
14.	Opini pemeriksaan BPK.	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
15.	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	34,49%	36,57%	37,82%	103,42	42,57%	88,84
16.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	3,14%	6,29%	6,29%	100	15,72%	40,01
17.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	63,93%	63,42%	64,21%	101,25	90%	71,34
Capaian Rata-Rata							79,10%

Sumber: BAPPEDA DIY, 2014

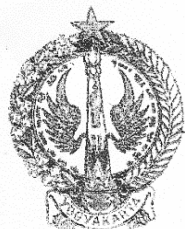
Lampiran 4 : Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara Utama Tahun 2014 Tingkat Provinsi Kategori A



Lampiran 5 : Prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, Predikat “A” (Sangat Baik);



Lampiran 6. Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja :



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Komplek Kepatihan Danurejan
Telepon (0274) 562811 (Psw 209-220, 243-247, 253), 589583 Fax. (0274) 586712
website <http://www.bappeda.pemda-diy.go.id> e-mail: bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id

**YOGYAKARTA
Kode Pos 55213**

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tavip Agus Rayanto, MSi

Jabatan : Kepala Bappeda DIY

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hamengku Buwono X

Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua



Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

HAMENGGU BUWONO X


Yogyakarta, 11 Maret 2014
Pihak Pertama


Drs. TAVIP AGUS RAYANTO, MSi
NIP. 19641107 199103 1 004


PENETAPAN KINERJA

SKPD : BAPPEDA DIY
TAHUN ANGGARAN : 2014

No	SASARAN	INDIKATOR	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	20,45%	1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Penyusunan Rancangan RKPD - Penyusunan KUA dan PPAS - Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan - Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan - Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan - Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.657.488.500 659.255.000 203.005.000 157.615.000 326.867.500 182.102.000 128.644.000
2	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana	20,45%	1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI - Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan - Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha - Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan - Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha - Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)	1.084.225.500 379.984.000 323.042.000 175.939.000 147.715.000 57.545.500
				2. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA - Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	1.423.702.700 299.999.350

				- Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM	350.000.000
				- Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra	399.997.000
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM	148.710.000
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra	149.999.150
				- Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs	74.997.200
				3. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	1.830.253.000
				- Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM	599.870.000
				- Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	450.000.000
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM	174.995.000
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	120.000.000
				- Pembinaan Penataan Ruang Daerah	200.000.000
				- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah	195.388.000
				- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	90.000.000
				4. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	1.224.531.950
				- Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik	363.375.000
				- Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	329.477.100

				<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik - Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan - Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) di Provinsi DIY - Fasilitasi Pemberantasan Korupsi - Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah 	125.000.000 157.019.600 95.082.000 83.761.250 70817000
3	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	79%	1. PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan - Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa - Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY - Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah - Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat - Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Lingkup PEMDA DIY dan Kabupaten/Kota - Monitoring dan Evaluasi Pengentasan Kemiskinan - Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan - Pengembangan Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 	3.184.433.300 150.000.000 299.995.000 216.155.500 59.800.000 141.067.000 74.999.975 124.999.925 45.775.000 51.603.000 118.639.000 490.550.000 1410848900

4	Data perencanaan yang aktual dan valid	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	96%	1. PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH - Pengolahan, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Data Statistik Daerah - Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	2.185.514.000 1.714.546.000 470.968.000
5	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	70%	1. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI - Pengembangan Sistem Informasi Profile Daerah - Ekspose Perencanaan Pembangunan Daerah - Pengembangan Sistem Jaringan Internet - Pengelolaan Website	334.742.110 107.870.000 49.551.500 153.986.110 23.334.500

Jumlah Anggaran :	Rp	17.870.901.960
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.657.488.500
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp	1.084.225.500
3. Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp	1.423.702.700
4. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	Rp	1.830.253.000
5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Rp	1.224.531.950
6. Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Rp	3.184.433.300
7. Program Pengembangan Statistik Daerah	Rp	2.185.514.000
8. Program Pengembangan Data/Informasi	Rp	334.742.110
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.523.229.600
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	2.948.116.725
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	346.064.000
12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja	Rp	128.600.575

Yogyakarta, 11 Maret 2014



KEPALA

